

NOMADISME DAN SKIZOFRENIA POLITIK(POSTMODERN) SBY Tinjauan Pada Beberapa *Image* SBY Di Media Massa Online

Eko Nugroho

Dosen di UPDM (B) Jakarta, Jln. Hang Lekir, Jakarta Pusat, HP : 081310856835
(Naskah diterima secara langsung 2 Oktober 2011, disetujui terbit 16 Desember 2011)

ABSTRACT

The article based on indications of the emergence of the phenomenon of SBY's schizophrenia and political nomadism in online media. Therefore, this paper focused on how schizophrenia and political nomadism is seen in some news about SBY in online news. The results showed that Schizophrenia of SBY is visible from many semiotic nomadisms, in which case the SBY's establishment and identity is floated and opportunists in two cases that reviewed. Popularity tends to affect how he needed to pressure political decision making. SBY's political conversations as if done by several different people. As if his true identity cannot be described with certainty.

Keywords : *Nomadism; schizophrenia; online media; political.*

ABSTRAK

Artikel ini bertolak dari munculnya indikasi fenomena skizofrenia dan nomadisme politik SBY dalam pemberitaan media online. Karena itu, paper ini terfokus pada persoalan bagaimana skizofrenia dan nomadisme politik terlihat dalam beberapa pemberitaan tentang SBY di berita online. Hasil telaah menunjukkan Skizofrenia SBY terlihat dari berbagai nomadisme semiotik, dalam hal ini pendirian dan identitas SBY terlihat mengambang dan oportunist dalam dua kasus yang diulas. Kepopuleran cenderung mempengaruhi bagaimana ia membuat keputusan politik. Pembicaraan pembicaraan politik SBY seolah-olah dilakukan oleh beberapa sosok yang berbeda. Seolah-olah identitas sejatinya tak bisa digambarkan dengan pasti.

Kata-kata kunci : *Nomadisme; skizofrenia; media massa online; politik.*

PENDAHULUAN

Latar belakang dan Permasalahan

Media massa dan aktor aktor politik dalam era informasi (*postmodern*) adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Ketergantungan aktor politik pada media dan representasi politik dalam media massa adalah sebuah senjata dan indikator politik bagi seluruh pelaku politik. Brian Mcnair dalam bukunya *An Introduction To Political Communication* (2003:4) mengatakan, komunikasi politik menyangkut berbagai hal tentang aktor politik dan aktifitasnya seperti yang dilihat dalam media massa. Pendapat Mcnair ini memperlihatkan bahwa dalam dunia politik media massa mempunyai peranan penting. Dikatakannya ada tiga entitas penting dalam suatu kajian komunikasi politik, yaitu masyarakat (*citizen*), aktor politik dan media massa (Mcnair 2003:6). Dalam hal ini penekanan aktifitas komunikasi yang berpolar

pada aktifitas politik sang aktor politik menjadi pusat perhatian, karena pelaku-pelaku politik kerap memberikan pesan-pesan politik dalam *image-image* tertentu pada masyarakat, dan saat ini tentu saja pada masyarakat bermedia adalah bagaimana *image* politik seorang aktor muncul dalam media massa.

Jika menyangkut media massa, tentu saja ini berkaitan dengan bagaimana aktifitas politik dari aktor politik diberitakan, ditandakan, atau dibingkai oleh media massa. Bagaimana aktor-aktor politik berbicara, atau dibicarakan oleh media secara aktif, atau bagaimana kemudian aktor politik mengkonstruksi *image*-nya di media massa melalui pembicaraan dan tindakan politiknya -- melalui asumsi besar, media sebagai kendaraan politik (*political vehicles*).

Pembicaraan tentang aktor politik dalam ruang media menjadi penting bagi ruang politik, komunikasi politik, dan percaturan didalamnya, karena pembicaraan ini menentukan suatu bentuk mobilisasi fisik dan intelektual yang membangkitkan suatu opini publik. Sehingga kepentingan ini mendorong aktor politik menjadikan media sebagai alat utama dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Menurut McNair, seorang aktor politik harus menggunakan media massa agar pesan-pesan politik mereka diterima *audience* melalui suatu bentuk reportase ataupun pemberitaan tertentu oleh media (McNair 2003; 12). Ujung dari aktifitas ini tentu saja sebuah dukungan publik yang melanggengkan tujuan-tujuan politik mereka, dalam hal ini untuk mencapai kelanggengannya aktor politik biasanya mengonstruksi diri mereka atas tuntutan popularitas dan selebritas, di mana mereka kemudian menjadi selebritas media massa.

Dengan masuknya media sebagai salah satu bentuk aktifitas politik, maka badan media adalah sebuah badan politik yang secara langsung atau tidak langsung menjadi sebuah alat kekuasaan. Media menurut Altschull kerap berperan sebagai *agent of power* (Altschull 1995: 5), dan karenanya isi media tergantung pada kekuatan yang memberi kehidupan padanya, yaitu yang disebut oleh Altschull sebagai *paymaster* (Altschull 1995; 53). *Paymaster* itu biasanya adalah sebuah institusi ataupun sosok persona bernuansa politik, yang berusaha mencari cara untuk merebut ataupun melanggengkan status quo dan kekuasaan melalui bentuk-bentuk penandaan dan konstruksi *image* di media. Dan kemudian representasi politik dibuat berdasarkan hasrat dari persona atau badan politik *pay master* tadi.

Terlepas dari media sebagai alat kekuasaan, representasi aktor politik adalah satu bentuk aktifitas kekuasaan yang terus ada sejak awal perkembangan media. Media kerap dijadikan tempat munculnya aktor-aktor politik dengan berbagai kepentingan. Tempat munculnya pesan-pesan politik yang mengacu pada satu hal 'kekuasaan'. Namun, kekuasaan itu banyak yang tidak diungkapkan dalam terma-terma dan penanda yang jujur, yang artinya antara janji, *image* realitas politik dan realitas itu sendiri tidak lagi merupakan satu kesatuan dalam ruang tindakan politik seorang aktor. Ini semua ada dalam konstruksi realitas yang sedemikian rupa untuk memunculkan representasi politik yang ideal, seperti yang diinginkan tujuan-tujuan komunikasi politik. Hal ini seperti diungkapkan Berger dan Luckman, bahwa realitas sosial adalah sebuah bentuk konstruksi realitas. Di mana realitas sosial bergantung pada bagaimana distribusi pengetahuan, dan pengetahuan itu sendiri merupakan hasil dari pengetahuan-pengetahuan dalam masyarakat yang membentuk masyarakat atau kehidupan kita

sehari-hari (Berger dan Luckman:1979;56). Dalam konteks media, tentu saja ini terjadi melalui proses objektifikasi, melalui simbol-simbol dalam media. Dalam konteks komunikasi politik, para aktor politik menggunakan simbol-simbol dalam media untuk mengungkapkan berbagai kehendak dan hasrat kekuasaannya (*will to power*). Kerap para aktor melakukan berbagai manuver yang berbau kebohongan publik dengan menyatakannya sebagai sebuah 'seolah-olah' kebenaran, atau tampil untuk kepentingan pribadi, tetapi dengan topeng kepentingan umum. Sehingga dalam komunikasi politik di era informasi dan bermedia saat ini, politik kebohongan kerap dilancarkan dengan memoles rapih batas-batas antara jahat dan baik, salah dan benar, sehingga batas-batas oposisi biner itu menjadi pupus ditelan satu mantra politik 'kebenaran'. Umberto Eco mengatakan setiap yang bisa digunakan untuk mengatakan (menyatakan) kebenaran juga bisa digunakan untuk mengatakan kebohongan, sehingga inti dari kajian semiotika adalah mempelajari kedustaan atau membangun suatu teori tentang kebenaran dusta melalui penanda-penanda (Eco 1979:7). Dalam konteks tersebut pendapat Eco bisa menjelaskan bahwa kebenaran-kebenaran yang dikonstruksikan dan dipolitisir melalui 'pelintiran' informasi dan pencitraan tertentu dari aktor politik bisa merupakan pembenaran kebohongan. Atau merubah yang bohong menjadi samar, dan kemudian seolah-olah benar, sehingga memiliki daya tarik politis tertentu.

Politik postmodern adalah politik yang kerap timbul dalam tataran pencitraan. Para aktor politik kerap menjadi agen-agen pencitraan di media. Masyarakat massa mengenal dan mengkonsumsi relitas *image* para aktor hanya dalam bentuk *image* semata. Sebuah *image* yang kerap sebenarnya tidak bertautan dengan realitas personal dari sebuah ketokohan itu sendiri. Baudrillard menyebut ini sebuah model realitas yang olehnya disebut simulasi.¹ Politik simulasi hanya menghadirkan sebuah politik yang tidak reflektif. Hanya politik perifer yang memberikan kesadaran hanya di lapisan perifer, atau hanya pada lapisan *image* belaka. Sementara kebenaran boleh dan sah-sah saja menghilang. Ini artinya kekuasaan berdiri di atas konstruksi kekerasan simbolik yaitu sebuah konstruksi kebohongan yang memutuskan realitas, antara kebenaran dalam masyarakat dengan *image-image* politik dan konstruksi *image* politik dalam media.

Kekuasaan sering menggunakan praktek pencitraan untuk menggambarkan eksistensinya. Melalui citra media -demi sebuah kekuasaan atas citra diri, dan opini publik-aktor politik bisa jadi siapa saja dan apa saja. Berubah-ubah, meloncat dari satu sosok ke sosok lain. Menjadi sosok-sosok yang mempunyai daya tontonan yang besar. Sehingga secara psikis pun, para politikus yang dicirikan oleh sifat sifat inkonsistensi, tidak pernah menetap dan tanpa ketetapan diri yang tetap (ucapan, diri, identitas dan keyakinan, ideologi) (Piliang 2005;150)

Susilo Bambang Yudhoyono sebagai sosok presiden Indonesia yang dipilih dan berkuasa sepanjang dua periode, di mana waktu-waktu berkuasanya merupakan era modern dan bahkan era postmo, sebuah era kekuasaan yang ditentukan oleh politik dalam konteks

¹ Simulasi adalah suatu *image* yang tidak memiliki rujukan realitas. Bahwa realitas atau substansinya telah hilang dan yang ditinggalkan hanya *image* semata sebuah *image* yang benar benar *image* murni tanpa acuan relitas, dan relitas adalah *image* itu sendiri. Dimana tidak ditemukan batasan antara penanda, dan petanda (lihat Baudrillard 1983:11)

bermedia. Dalam beberapa kritik oleh banyak orang, SBY dinilai terlalu ‘mempermainkan’ citranya. Tak kurang rival ‘perang dingin’-nya Megawati Soekarno Putri pernah mengkritiknya keras sebagai sosok yang terlalu asik dengan politik pencitraan, dengan dinilai SBY hanya ‘tebar pesona’ saja (Pandie 2007:101). Yang coba dikatakan Megawati sebenarnya, bahwa SBY sepertinya hanya menggunakan perpindahan citra dalam kehamburan citra-citra politik di media massa. Sehingga terlihat seperti seorang pesolek, dan pada tataran realitas masyarakat tidak seperti pencitraan yang dibuat. *Image* politik seolah bukanlah suatu bentuk representasi reflektif tetapi suatu konstruksi persona skizofrenik yang muncul akibat dinamika transpolitik (politik postmodern).

Dalam menanggapi beberapa kasus besar di negeri ini, komunikasi politik dan tindakan politik SBY menampilkan pencitraan yang berbeda, pencitraan dalam bentuk tindakan-tindakan dan ujaran-ujaran politik. Misalnya, pada saat menanggapi aksi terorisme SBY terlihat menyudut kelompok bernuansa Islam (dengan mencoba melakukan manuver untuk mengawasi pesantren dan mengawasi dakwah). Namun ketika kampanye, SBY kerap ditemukan mendekati ke pesantren-pesantren dan tokoh islam juga memakai identitas ke-Islam-an. Seolah-olah ada dualisme dan ke-bunglonan citra dirinya -- terutama konstruksi pencitraan media atas dirinya. Ini tidak di temui dalam beberapa *image* dan retorika politik pemimpin sebelumnya. Soekarno dan Soeharto cenderung konsisten pada pendirian, identitas dan kebijakan politik tentang sesuatu. Mereka cenderung mengambil manuver, tindakan serta pesan dan penanda politik berdasarkan pertimbangan idealis diri mereka dan kebanyakan tidak berubah sampai akhir pemerintahan mereka masing masing -- Soekarno dan Soeharto hidup dan berkuasa pada masa masa sebelum era informasi, dan masih bernuansa industrial modern belum masuk dalam asumsi postmo.

Deleuze dan Guattari menyebut ini dalam bukunya *nomadology: the war machine* sebagai suatu nomadisme, yaitu suatu bentuk perpindahan sosok atas citra-citra, dalam konteks politik tentu ini adalah cita-cita politik dalam kasus hubungannya dengan bentuk-bentuk skizofrenia politik. Yasraf Amir Piliang menjelaskan, pendapat ini sebagai bentuk tindak politik yang biasa disebut nomadisme politik. Dalam era postmodern saat ini menurut Yasraf, nomadisme politik mengarah pada bentuk semiotika politik yang tidak stabil, artinya penandaan dan pencitraan politik selalu berubah. Sebuah perubahan semiotika politik yaitu perpindahan transmudasi, transposisi, deformasi, dan metamorfosis pada tingkat semiotik. (Piliang 2005; 159). Dan dalam hal ini, sifat keberpindahan citra politik yang coba ditonjolkan SBY dalam logika transpolitika merupakan bentuk-bentuk perpindahan yang mengacaukan citra dirinya. Seperti dituliskan oleh Yop Pandie seorang wartawan senior Suara Karya dalam bukunya Polemik Cabut Mandat SBY (2007), menurutnya SBY sendiri belakangan mengembangkan cara berkomunikasi yang mirip gaya presenter televisi, atau acara hiburan, minta diberi tepukan tangan (Pandie 2007,103), bergaya seperti penghibur dll, semuanya bersifat polar pada bentuk bentuk pemuliaan dirinya, atau menjadikan dirinya sebagai dekat dengan rakyat, dan lain-lain, suatu bentuk manifestasi praktek politik citranya.

SBY dilain sisi ketika menanggapi masalah seperti terorisme, gaya militer, dan responsifnya seolah sangat kental terlihat. Seperti pada kasus Marriot yang dengan ‘ujug-ujug’

presiden memberikan keterangan pers di depan reruntuhan JW Mariots setelah serangan teroris beberapa waktu lalu. Sehingga terlihat berkesan penjelasannya diada-adakan -- kalau boleh di bilang seolah-olah tidak siap dan tergesa-gesa. Ini demi pencitraannya melawan Kalla ketika itu (SBY merupakan rival Kalla pada pemilu 2009). Bukan berdasarkan kesiapan fakta tapi justru pada orientasi memburu tingkat pencitraan tertentu. Lalu ketika memberikan konferensi pers terkait Century, seolah-olah SBY menjadi seseorang yang terlihat adil (kalau boleh dihaluskan dari lepas tangan). Bahwa SBY seperti tidak bergerak dalam memberikan suatu pandangan yang jelas terhadap publik. Alih-alih memberi pandangan bahwa formasi eksekutifnya dan keputusan politiknya atas Centruy adalah penyelamatan, SBY justru memperlihatkan bahwa, adanya kesan keterlibatan struktur eksekutifnya, dalam kasus ini melalui beberapa pendapatnya yang dikutip pers. Sehingga terkesan ini sengaja dibuat tak jelas dan mengambang. Seolah-olah ada dualisme dan sangat terlihat mengikuti suatu arus tertentu dan potensi popularitas tertentu, bukan atas pertimbangan politik yang matang dan cerdas, dan ini terlihat dari banyak pendapat dan tindakannya yang dicitrakan media massa.

Dalam sebuah tulisan di harian Kompas, Rabu 25 Agustus 2010, hal 6, berjudul Gita Citra(cita) dari Istana, Effendi Ghazali mengkritisi pencitraan SBY tersebut. Menurutnya, citra memang merupakan bentuk gaya komunikasi politik berbagai pemimpin di dunia. Citra-citra SBY harus juga diikuti oleh sebuah kekuatan realitas yaitu cita yang merupakan inspirasi positif bagi masyarakat yang merupakan bagian dari pencitraan itu sendiri, yang di banyak hal SBY mengalami kelemahan dan kecenderungan penggunaan citra sebagai pesolek belaka, sebagai alasan pemaaf bukan sebagai cita (inspirasi dalam bertindak).

Permasalahan

Dengan kendaraan citra SBY bergerak dalam konteks politik pencitraan yang cenderung dangkal, tidak substansial, cenderung kosong dan perifer. Dalam masa postmodernisme atau diasumsikan demikian, ini adalah suatu yang wajar dan dirayakan. Pribadi skizofrenik yang nota bene melompat dari satu karakter politik ke karakter politik lain dengan permainan semiotis yang kompleks, hanya menonjolkan suatu citra-citra dangkal. Ini menjadi alat dan orientasi utama aktifitas politik para aktor politik postmodern. Sehingga banyak kiranya retorika dan manifesto politik SBY cenderung tidak menyentuh ke tataran realitas masyarakat, dan berkesan banyaknya fakta kabur dan konstruksi-konstruksi tidak transparan dalam bentuk-bentuk pencitraan tindakan dan tindakannya itu sendiri. Di mana tindakan-tindakan nyata tidaklah terwujud dari retorika- retorikanya. Hanya menyajikan janji mesra dan 'obat penahan rasa' sementara. Sementara saluran realitas ke masyarakat macet, dan bahkan tak ada. Yang ada hanya komunikasi politik yang terfragmen antara diri pribadi presiden, konstruksi citranya dan idealisme politik kelompok serta realitas masyarakat Indonesia sendiri.

SBY sendiri sebagai diri akhirnya terlihat ragu-ragu dan bingung. Kemungkinan keraguan ini adalah sebuah sedimentasi dari bentuk-bentuk hasrat kekuasaan yang menjadikan citra sebagai alat politik utamanya, sehingga adanya alineasi diri dalam karakter dan identitas SBY sebagai politikus. Ini sebenarnya adalah karakter yang tidak aneh dalam politik postmodernisme -- karakter skizofrenik dan gemar bernomadisme politik. Untuk itu, paper ini

mencoba mempermasalahkan bagaimana skizofrenia dan nomadisme politik terlihat dalam beberapa pemberitaan tentang SBY di berita online, terutama dari tindakan dan ungkapan beliau yang dikutip media, dan juga ingin dijabarkan dan ditinjau bagaimana karakteristik politik postmo memungkinkan ter-aleniasi-nya figur politik SBY dari identitas sebenarnya dan tenggelam menjadi sebuah pencitraan kosong semata (hiperrealitas)?

PEMBAHASAN

Skizofrenia Politik Citra dan Nomadisme Politik

Politik postmodernisme banyak ditandai dengan kemunculan citra-citra otonom atau citra citra murni. Dimana pesan-pesan politik yang juga didalamnya mencakup representasi identitas politik seorang aktor ikut menjadi citra murni. Yang oleh Guy debord, seorang teoritis situasionis Prancis disebut sebagai mekanisme masyarakat tontonan (Holmes 2005, 31-32), yang artinya aksi politik dan identitas politik seorang aktor politik hanyalah sebuah konstruksi pencitraan dengan relasi politik yang hampir-hampir jauh dari kenyataan manuver politik.

Inti politik dalam konteks ini menjadi sebuah politik citra, sehingga bentuk komunikasi dan pesan-pesan aktor politik adalah citra-citra palsu yang dibangun oleh para aktor politik itu sendiri, dengan media sebagai alat utama, dan sebuah alat pencitraan bagi asupan citra pada masyarakat tontonan.

Dalam suatu manuver politik, sosok aktor politik haruslah sosok yang memang diberi kekuatan representasional yang tinggi, artinya dikonstruksi sesuai keinginan dari publik. Seolah olah sebagai konsumsi ekonomi dari sebuah produk politik. David Chaney dalam bukunya *Lifestyle: Sebuah Pengantar Komprehensif* (1996) mengatakan politisi berupaya memanipulasi citra mereka menyanjung-nyanjung dan menghindari publisitas yang merusak (1996, 173). Pendapat Chaney ini dapat ditemukan dalam berbagai kasus empiri komunikasi politik menyangkut aktor politik di era informasi dan postmodern. Misalnya bagaimana seorang kepala negara atau selebriti/artis terkenal tidak ingin dilihat cacat, sehingga banyak faktor diperhitungkan dalam bentuk-bentuk konstruksi imajinya di media massa.

Citra menurut Chaney, lebih merupakan sesuatu yang dangkal dan lebih dari sekedar substansi. Kemungkinan makna penampilan terlepas dari makna organik dalam hal apa yang terrepresentasi dan menjadi otonom (Chaney 1996, 173). Sehingga pencitraan politik hanya menyajikan *floating sign* yang tidak berhubungan dengan realitas. Hanya sebuah “pakaian” tanda-tanda tanpa kedalaman bahkan tanpa realitas.²

Menurut Gilles Deleuze dan Felix Guattari bahwa dalam postmodernisme --khususnya di media-- terjadi sebuah perayaan penyebaran hasrat dan subyektifitas yang bersifat skizoid dan nomaden (Kellner 2010, 319). Menurut Douglas Kellner dalam buku *Budaya Media* (2010)

² *floating sign* merupakan konsep dari Fredrich Jameson mengenai substansi realitas penanda dalam yang ia sebut kapitalisme akhir yang didefinisikan sebagai kondisi posmodernitas.... kondisi dimana penanda merupakan suatu penanda murni dengan miskinnya substansi realitas sebuah penanda dari ruang ada dan tiada.. Tanpa realitas atau referensial penanda yang juga merupakan interpretasi dari sesuatu atau boleh dikata sebuah penanda dalam penanda....(Jameson 1991:96..)

bahwa identitas postmodernisme dalam kondisi ini terkait suatu aliran euforia yang tidak berpusat, tidak lagi memiliki kedalaman, substansialitas dan keutuhan (Kellner 2010, 318).

Lebih jauh tentang citra media, menurutnya hal ini adalah sesuatu yang tak bisa lepas dari budaya dan identitas manusia postmodern. Ini ciri citra-citra itu sendiri dalam ruang postmo, dimana ciri khas budaya postmodernisme ditandai dengan: pembiakan dan penyebaran citra tanpa kedalaman makna, *pastiche* dan carut marut bentuk (Kellner 2010, 320). Disini Kellner ingin menjelaskan bahwa nomadisme dan skizofrenik adalah ciri identitas dari persona aktor dalam konteks budaya postmodern; yaitu sebuah kecarut-marutan bentuk pencitraan tentang atau oleh si aktor yang memang sudah tidak berreferensi dengan realitas -- dimana citra adalah realitas itu sendiri bukan hubungan representasional tetapi sebuah hiper-realitas dan simulasi. Terlihat dalam konteks ini logika yang tumbuh dalam komunikasi politik adalah bagaimana pesan politik dan pencitraan politik yang merupakan citra kosong dan dikonsumsi secara orientasi permukaan -- bukan relasi pada tataran realitas. Sehingga boleh dikata aktor politik sebagai bentuk komunikator politik terlihat seperti seorang gila (skizofrenia) yang tidak mengerti tentang apa yang diucapkannya, tidak sadar dan berubah ubah identitas dalam nomadisme imajinasinya. Begitu pun akhirnya *image* dalam logika pencitraan politik yang kemudian sangat skizoid dan nomadik. Dan tentu saja aktor politik adalah sesosok bayang-bayang tanpa substansi pertanda yang jelas, disublimasi dan ditampilkan dengan senyuman yang dibuat indah tanpa pernah bersubstansi demikian.

Berdasarkan pendapat Deleuze dan Guattari, Yasraf Amir Piliang dalam bukunya *Transpolitika* (2005) mendefinisikan nomadisme politik; sebagai sebuah kecenderungan perpindahan terus menerus dalam politik, baik ditingkat individu kelompok, dan masyarakat, juga baik pada tingkat diri, personalitas, identitas, subjek, keyakinan dan ideologis (Piliang 2005, 157). Dalam hal ini Piliang menetapkan perpindahan itu secara spesifik dalam konteks semiotika.

Gilles Deleuze dan Felix Guattari seperti dikutip Piliang melukiskan nomad sebagai setiap entitas politik yang dicirikan oleh sifatnya yang selalu berpindah, menjadi (*becoming*), berdeformasi, bertransmutasi, bermetamorfosis: turbulen, tanpa ego, eksesif deviatif tanpa pusat, anti identitas, anti ketetapan, selalu mengalir dan selalu bergejolak (*flux*) (Piliang 2005, 157). Sehingga simbol-simbol yang menggambarkan, atau digambarkan tentang realitas dirinya dengan mudah berubah-ubah dan bergerak-bebas tak beraturan pada ruang simulasi. Ini membuat persona nomadik tidak mempunyai ketetapan politik, tidak mempunyai realitas yang inheren dengan penanda-penanda tentang dirinya. Semua realitas hanyalah konstruksi kosong, selalu berbeda, dan kacau dengan *image* yang muncul. Bahkan lebih sering secara pekat, realitas yang akhirnya dianggap sebagai realitas adalah *image* itu sendiri. Dan *image* bukanlah suatu yang benar-benar diacu oleh si aktor. Hanya serupa topeng dan *counterfeit* belaka.

Dalam pandangan semiotik, menurut Piliang ada sebuah perubahan pada tingkat semiotika politik yang artinya memungkinkan aktor politik untuk melakukan perubahan citra melalui penanda-penanda politis dalam masyarakat. Ini juga terkait dengan berbagai retorika aktor yang terus berubah-ubah, dari bentuk simbol yang satu ke simbol yang lain seolah-olah setiap simbol adalah topeng, yang artinya realitas simbolisme politik adalah sebuah nomadisme skizofrenik yang semuanya adalah palsu. Sehingga pergantian posisi tanda bersifat artifisial

yang artinya transposisi semiotik itu hanya semu, hanya mengubah pada tingkat kulit permukaan tanda (penanda) tanpa mampu menawarkan perubahan makna politik yang lebih dalam (Piliang 2005, 59).

Seorang nomad politik selalu mengembangkan di dalam dirinya tanda-tanda skizofrenik yaitu semacam tanda-tanda yang selalu mengalir, berpindah dan beralih teritorial tanpa henti (Piliang 2005, 60). Akibatnya biasanya para aktor politik terlihat lebih populis dan menjadi oportunis dalam komunikasi politiknya -- komunikasi politik dan tindakan politik sebagai realitas bahkan terlihat berbeda. Atau seolah-olah tidak tegas dan terus bergerak, dengan banyak manuver, sehingga ideologi dan idealisme serta kejelasan tujuan politik menjadi samar dan tidak jelas. Kalaupun ada tujuan itu hanya seperangkat *image* dan penanda yang tentu saja kosong substansi. Ini biasanya temporal, cenderung cepat berubah sesuai popularitas; bukan berdasarkan substansi perencanaan dan realitas perubahan serta pengembangan masyarakat yang seharusnya.

Dalam kehidupan era informasi –postmodern- saat ini komunikasi bermedia membangun citra-citra politik yang terus menjadi tembok atas realitas dan *image*. Wacana politik berkembang ke arah politik simulakrum atau politik citra (Piliang 2005, 225). Dan media akhirnya menjadi sebuah propeller untuk pergerakan citra dengan sangat luas. Semua yang berimajinasi surealistik sekalipun dapat hadir dan mengada di ruang-ruang media apalagi sekarang eranya multimedia dimana berbagai manipulasi bahasa, visual, audio dan berbagai kombinasi citra menghasilkan aliran lompatan nomadisme yang lebih luas dan kencang, sehingga skizofrenia menjadi sebuah kekuatan dan sifat-sifat baru bagi aktor politik sebagai pelaku politik simulakra itu sendiri.

Skizofrenia merupakan bentukan gaya hidup politik dari setiap aktor politik tersendiri - dalam era postmodern. Bahwa tampilan luar atau citraan yang tidak stabil atas identitas menjadi sebuah sorotan utama dan komoditas permainan utama dari bentuk-bentuk citraan dalam komunikasi politik. Entitas sosial seperti para aktor (termasuk aktor politik) dan gaya-gaya dilekati karakter khusus melalui tata cara penampilan. Identitas-identitas personal yang dibentuknya pun bersifat kurang stabil dan koheren dalam suatu budaya yang didalamnya makna dan objek-objek tertentu diciptakan kembali (didaur kembali) (Chaney 2004, 186). Sehingga penampakan luar --yang memang disesuaikan oleh kategori sosial, yang terus melihat selera pasar dan popularitas-- justru mengkonstruksi diri dari si aktor politik untuk bisa mendapatkan dukungan populis.

Logika dan strategi citra ini tidak lebih hanyalah penumpukan permainan nomadisme, citra politik yang merupakan gejala permainan dan perayaan atas identitas-identitas mayor persona skizofrenia politik itu sendiri. Secara teoritis pandangan tentang bagaimana pesan-pesan politik dari para aktor politik, dalam konteks sifat-sifat politik postmodernisme mengacu pada kedangkalan sifat permukaan citra politik. Pesan-pesan hanyalah bentukan-bentukan dari citra-citra tanpa substansi yang tetap. Substansi politik cenderung bergerak. Identitas politik seolah hanya identitas, tidak lagi tumbuh sebagai satu kesatuan dengan idealisme politik sang aktor.

Aktor-aktor politik terlahir dari konstruksi pencitraan. Konstruksi yang memprioritaskan gejala penampakan. Suatu perayaan penampakan yang cenderung surealistik

menentukan petanda-petanda dengan interpretasi, yang artinya petanda tumbuh menjadi konsep interpretasi -- artinya petanda bersifat sebagai penanda-penanda, tidak ditemui petanda yang jelas sebuah realitas yang dibangun dari hiperealitas yang semua struktur kenyataannya pada dasarnya juga sebuah ketidaknyataan.³ Alih-alih mendapat substansi politik ternyata yang didapat hanyalah kulit luar (atau penanda-penanda) saja dari ribuan retorika politik kosong -- yang ada berupa banjir citra politik dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dalam kesurrealistikannya, maka tidak ada yang pasti pada diri sang aktor politik. Bahwa *image* sang aktor hanyalah ilusi yang dibangun dalam ruang-ruang lain diluar ruang realitas masyarakat dan dirinya, dalam sebuah ruang realitas politik bermedia. Sifat penanda dalam media --terutama-- cenderung bergerak sesuai konstruksi tidak ada realitas yang mereferensikannya secara total. Bahkan kalau perlu dibuat sebuah ilusi, tidak ada substansi yang membedakan realitas dengan segala bentuk citra. Semua citra murni, yang digunakan para aktor secara parsial dan berpindah, tanpa pernah menganut identitas yang jelas dan tetap secara umum.

Dalam memandang pencitraan aktor politik dalam konteks politik dalam ruang postmodern, ada beberapa hal yang menjadi basis asumsi teoritik. Pertama, permainan citra politik terpisah dari realitas. Artinya citra murni telah menjadi bentuk acuan tersendiri, otonom dari ruang-ruang realitas politik. Konstruksi selebritisasi dan orientasi performa populis menghidupkan boneka-boneka dan robot-robot politik yang begitu regular dan klise. Seperti logika mesin penjawab telpon yang terus menjawab, tanpa pernah tahu bahwa kata-kata dalam jawaban tidak lagi bersubstansi dan memiliki kedalaman interpretatif tertentu.

Kedua, kebohongan politik dilihat dalam konteks perpindahan atau kelabilan pencitraan, logika kebohongan mungkin bukan lagi menjadi kebohongan, tapi sebuah naturalisasi. Yaitu bentuk naturalisasi yang terlihat pada perpindahan penanda. Seolah-olah realitas berubah cepat, padahal hanyalah sebuah tindakan-tindakan komunikasi politik yang kosong dan populer, serta tidak memiliki pendirian tetap, yang artinya segala pesan politik aktor dan regularitas perubahan -- yang kemudian menaturalisasi kebohongan melalui regularitas tersebut -- hanyalah sebuah klise semata. Tidak ada realitas yang coba disikapi atau digambarkan secara serius, hanya sebuah ruang pesan dengan sifat permainan semiotis yang simulacrum, terus berputar dalam lingkaran kebohongan pencitraan. Konsekuensinya, adanya kemungkinan regularitas logika bertumpuk sehingga keluarlah banyak wacana politik yang

³³ Sifat masyarakat postmodern menurut sosiolog Scott Lash dalam bukunya Sosiologi Postmodern (2004) adalah terbangunnya ruang-ruang surealistik, dimana realitas masyarakat dalam hal ini bentuk-bentuk penanda representasional dan diskursi masyarakat bersifat surealistik sama dengan karya karya seni surealistik yang menyajikan imajinasi yang tidak berakar pada ruang realitas. Seolah ide bergerak dalam hubungan interpretasi di dalam ruang ruang yang tidak berasal dari ruang relitas. Hanya sebuah konstruksi imajinasi dan bangunan fantasy dan ilusi saja. Dalam surealisme seperti digambarkan lash penanda- penanda tumbuh dengan murninya menjadi petanda. Dimana sesuai sifat karya karya seni surealistik bahwa elemen penanda dikutip dari potongan realitas dan realitas sendiri adalah suatu *image* yang dibangun dari elemen- elemen penanda dengan kata lain dalam surealisme, hubungan penanda petanda ala saussureian tidak berlaku dan bahkan tidak ada, sehingga logikanya setiap penanda otonom dalam *image* dan bentuknya tidak berreferensi atau pun hidup dalam konteks penanda- petanda atau representasi dan realitas....(lihat lash 2004; 186)

terkadang arahnya tak jelas, populis, cenderung sebagai lipstik saja. Dan jelas tidak berhubungan dengan realitas politis dan ruang realitas persona ideal dari sang aktor itu sendiri. Ketiga, perpindahan citra sebagai bentuk sikzo frenia politik akibat terjadinya banjir citra dan tontonan, hasrat untuk dilihat dan menikmati segala kepopuleran melalui permainan citra sangatlah merupakan syarat utama bagi aktor politik --dalam konteks postmodernitas, yang oleh Yasraf disebut dalam terma transpolitika -- dan Media massa mendukung hal ini. Bagaimana media massa menyediakan tontonan politik bagi ‘masyarakat tontonan’ tadi. Sehingga motivasi politik bergerak dari kepentingan publik ke arah polar-polar yang sifatnya populis dan cepat, menurut kepopuleran tuntutan penonton -- penonton di sini bukan konsep masyarakat, tapi konsepsi kepopuleran dan nilai ketertarikan untuk di tonton oleh orang. Dan logikanya, ini sangat cepat dan lebih cepat, dari gerakan konstruksi tanda dan hubungan representasional, sehingga representasi menjadi kacau – logikanya, ini cenderung berubah secara nomaden dan tidak lagi terletak pada identitas serta polar politik yang jelas. Polar tersebut terdapat dalam bentukan-bentukan realitas yang tidak merupakan realitas sebenarnya, sebagai kecarut-marutan realitas dan polar-polarnya. Ini tipikal terjadi pada skizofrenia -- dimana penanda pada dasarnya secara ekstrem atau pun tidak, tidak lagi menjadi penanda bagi realitas, ia hidup otonom dalam konstelasi pesan politik -- kacau seperti struktur berfikir orang gila dimana tidak ada hubungan logika referensial yang jelas, semua acak- acakan dan “seolah-olah” pada sebuah dasar eksibisionis semata atau narsistik parah yang merengut esensi dari pesan politik itu sendiri. Ini Untuk dijadikan semata mata, tindakan yang perlu sebagai sebuah mekanisme spectacle (tontonan) tadi. Sehingga pribadi si aktor cenderung majemuk. Dimana identitas si aktor dalam konstruksi citra tidaklah lagi identitas sebenarnya, seolah adanya racauan orang gila yang mana jelas tidak memberikan basis realitas pada setiap penanda yang ada. keempat, nomadisme politik sebagai tindakan politik, dengan ketidak jelasan dan kecairan idealisme politik dan bahkan identitas politik -- pada substansinya seorang aktor politik, laksana badan tanpa nama -- bergerak dari satu identitas dan penanda politik ke identitas dan penanda politik lain, pragmatis cenderung oportunistis. Ini tidak mempunyai basis dan batas-batas interpretatif. Semua berpindah dalam ‘topeng-topeng’ dan ‘dandanan’ yang begitu tebal. Hingga dirinya sendiri tak tahu siapa dirinya itu. Hanya terlihat apik dalam stelan-stelan jas atau retorika-retorika indah yang kencang. Namun esensi tanggung jawab politik dan komitmen politik adalah bukan pijakan, dan terus hanya berpijak pada topeng-topeng yang ‘licin’, berpindah dari satu hubungan citra dengan citra -- sebuah nomadisme.

Bentuk-Bentuk Nomadisme Skizofrenia Politik SBY

Nomadisme citra politik SBY terlihat dari bagaimana publikasi atau pencitraan yang berasal dari dirinya dan di kutip oleh media. Misalnya pencitraan pada saat memberikan konferensi pers mengenai terorisme menyangkut serangan teroris di Hotel JW Marriot pada tahun 2009, seperti ditulis http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/09/090918_polisi-waspada.shtml. Presiden menyebut ‘kemiskinan, keterbelakangan, pikiran-pikiran ekstrim sebagai akar lahirnya terorisme’. Disini terlihat presiden memberikan suatu bingkai atau merepresentasikan penyebab dari terorisme dituding dari masalah-masalah sosial ekonomi bukan masalah kelompok tertentu. Namun dalam pernyataan lain, SBY untuk hal yang sama

pada tahun 2010, seperti dikutip <http://www.detiknews.com/read/2010/05/17/101432/1358263/10/sby-kelompok-teroris-ingin-indonesia-jadi-negara-islam>, memberikan hubungan bahwa orang-orang dengan intensi etnis dan religius, dalam hal ini orang yang merupakan radikal muslim sebagai pelaku teror yang artinya motivasi; seolah-olah berubah dari faktor sosial ekonomi menjadi bentuk motivasi altruisme religius. Kalau kita melihat sepintas ini adalah bentuk komunikasi SBY yang seolah-olah meliuk liuk mengikuti ‘angin’ trend. Tidak ada pandangan politik yang jelas dan tegas dari segi kepemimpinan hanya melihat tren dan popularitas dirinya -- dimana trend dan popularitas dirinya dalam kalkulasi politik menentukan kelanggengan kekuasaan dan status quo atas dirinya -- sebagai tolok ukur komunikasi politik. Dimana bentuk pandangan dan idealis politik “real” yang berporos pada kepentingan publik tidak lagi menjadi sebuah orientasi, pesan-pesan komunikasi harus mampu menyelamatkan si aktor ketimbang menjadikan kepentingan publik sebagai substansi utama. Dan terbukti kalau dilihat seksama, sampai saat ini pelaku terorisme masih tidak jelas, hanya tuduhan-tuduhan kosong bernuansa populis dan sangat prematur, hanya untuk pengisi dan hiasan politis semata. Ini semua hanya ‘tuduhan kosong’ yang banyak diantaranya tidak bisa dibuktikan dengan jujur dan konsisten, semua pelaku dihadirkan sebagai sosok-sosok misterius dengan tuduhan-tuduhan yang seolah-olah mereka pelakunya -- ini terlihat juga dalam kasus di masa orde baru, tipikal kambing hitam. Lihat kasus Udin misalnya, semuanya hanya bagian dari konstruksi citra politik yang skizofrenik.

Gejala seperti ini juga terlihat dalam keterangan pers SBY menyangkut Century berikut. Menanggapi kasus Century SBY, mengungkapkan dua hal yang berbeda mengenai suatu topik dan tidak terlihat bagaimana sikapnya secara tegas, kecuali suatu pragmatisme politik belaka. Ini terlihat dalam dua bentuk pernyataan SBY mengenai isu tersebut -- yang terus bergulir sampai saat ini --, yang ditemukan berdekatan waktunya. SBY mengeluarkan dua citra tentang Century yaitu pertama, tindakan *bail out* dicitrakan oleh SBY sebagai tindakan yang tepat dan punya kesan heroik seperti dikutip dalam pemberitaan pada <http://news.okezone.com/read/2010/03/04/339/309289/sby-pasang-badan-soal-bailout-century> pada 4 Maret 2010. Dalam pemberitaan tersebut SBY diberitakan, mengatakan ‘kebijakan menyelamatkan Century dapat dipertanggungjawabkan, sebagai pemimpin negara berkewajiban menghindari dari krisis baru’. Ini menunjukkan sikap politik SBY, yang sangat protektif dan membela segala tindakan politik maupun administratif dari aparatus eksekutifnya. Sehingga jelas memberikan pesan politik dalam penda atau *image* bahwa dirinya dan kabinetnya tidak bersalah dan terlibat dalam kasus tersebut. Bahwa tindakan itu semata-mata adalah seolah-olah tindakan penyelamatan perbankan nasional dan seolah-olah demi kepentingan publik.

Pada pemberitaan kedua tentang hal yang sama. Pernyataan SBY menunjukan pada sebuah dugaan bahwa pada kasus Century atau pada *bail out* memang ada penyelewengan dan harus ditindak tegas. Ini terlihat dari pernyataan beliau yang di kutip <http://www.detiknews.com/read/2010/03/04/224107/1311612/10/sby-akan-pelajari-hasil-pansus-angket-century> pada tanggal 4 Maret 2010 yaitu ‘kita pun mesti mengetahui apakah kesalahan itu bersifat administratif atau sebuah pelanggaran hukum’. Dengan demikian, koreksi dan sanksinya menjadi lebih tepat dan adil. Terkait dengan kasus Bank Century ini, justru kita

harus menindaklanjuti secara tuntas indikasi penyimpangan dan kejahatan oleh pihak-pihak tertentu yang nyata-nyata merugikan negara. Dalam pernyataan ini, terlihat SBY mengindikasikan bahwa mungkin ada aparatnya yang terlibat dan seolah-olah, ia ingin jadi seperti penengah dan *hero*, dengan menunjukkan bahwa akan ditindak tegas dan lain-lain. Namun intinya berbeda dengan sebelumnya, bahwa SBY awalnya menganggap tindakan *bail out* itu benar. Namun kemudian, dalam hal ini SBY terlihat memberikan *image* bahwa ada keterlibatan pihak tertentu -- fakta kontekstual masyarakat sudah menginginkan dibeberkannya suatu bentuk fakta keterlibatan Sri Mulyani ketika itu --. Disini terlihat pernyataan politik yang bersifat skizofrenik dan nomadis dalam waktu yang berdekatan. Awalnya SBY menyatakan “pasang badan”, bahwa aparatnya dalam hal ini berbagai institusi keuangan melakukan tindakan benar, seolah-olah tidak ada masalah, dan bukan merupakan masalah pada pemerintahannya. Melihat kepopuleran opini publik dan desakan beberapa pihak -- yang berpotensi mengurangi kepopulerannya -- mengarah kearah adanya penyelewengan -terutama oleh media massa- maka dengan cepat keluar pernyataan-pernyataan politik sejenis. Kedua masalah ini diakhiri dengan penyelesaian tindakan politik pencopotan Srimulyani (secara halus diskenariokan sebagai alih jabatan dan alih fungsi).

Dari beberapa bentuk retorika/pencitraan SBY diatas, terlihat adanya perubahan penanda-penanda secara semiotis dari penanda-penanda yang bersifat memaknai bahwa pemerintahan bersih namun pada pemberitaan *round up* akhir terlihat bahwa SBY memberi dukungan dan memberikan suatu penekanan bahwa harus menindak yang terlibat yang notabene terarah pada anggota kabinetnya.

Kejadian seperti ini sering terjadi dalam (komunikasi politik) pemerintahan SBY. Dalam komunikasi politiknya SBY dinilai cenderung memperlakukan citra dan tidak konsisten. SBY bisa terlihat berperang dengan PDIP atau justru mesra dengan kubu oposannya itu. Dengan partai pendukungnya pun terlihat jelas bahwa adanya pencitraan yang dipengaruhi oleh politik dagang sapi, cenderung pragmatis dan berbagai kepentingan politik betujuan semata-mata untuk kelanggengan kekuasaan, bukan untuk kepentingan publik. Ini seolah menunjukkan tidak ada manuver yang tegas. Semuanya bersifat populis dan nomadis.

Semua ini secara teoritis ini bisa dijelaskan sebagai bentuk nomadisme politik secara semiotis. Bahwa komunikasi politik SBY terlihat cenderung memberikan suatu angin menuju sebuah trend yang lebih populis, sehingga arah atau pencitraan dalam komunikasi politik lebih cenderung didominasi oleh pesan-pesan dan penanda-penanda yang cenderung populis. Ini memang sejalan dengan bagaimana selebritis politik atau sosok politik terkenal membangun dirinya dalam pencitraan. Tak peduli kalau pencitraan itu adalah citra-citra semu dari suatu bentuk komunikasi politik.

Tindakan retorika dan pencitraan diri ini bisa dilihat dalam tiga rumusan penjelasan teoritis pertama, SBY pada dasarnya telah melakukan sebuah nomadisme politik. Yaitu perpindahan citra secara semiotis yang tidak begitu menetap dalam waktu yang singkat. Pandangan umum tentang suatu masalah terus berubah mengarah pada pergerakan trend politik dan masyarakat, sementara batas-batas nilai idealisme yang tergaris dalam manifesto-manifesto politik semasa kampanye hanyalah mode semiotis yang menjadi jejak-jejak nomadik dari sebuah selebritas kepresidenan, bukan langkah politik konkret. Karena langkah kongkretnya

tidak berefek dalam pandangan masyarakat, hanya sebatas kemunculan realitas pada tatanan media dan komunikasi politik. Yang artinya berubah menjadi permainan citra murni yang nomaden. Kedua, sikap politik skizofrenik, sikap ini terlihat tidak bertemunya citra politik dengan realitas kepentingan publik. Arah yang seharusnya sinkron antara realitas masyarakat dengan kepentingan publik, kemudian berbelok menuju arah yang tidak pernah bertemu. Bahwa apa yang dijadikan citra politik hanyalah sesuatu yang jauh dari kenyataan, sesuatu yang sebenarnya boleh dibilang bersifat hanya meredakan sesaat, hanya sebuah narasi pendek dalam konteks postmodernisme Lyotard⁴. Bukan merupakan suatu janji dengan implementasi yang nyata. Implementasi dimana setiap penanda politik pada dasarnya tidak memiliki realitas politik yang jelas lagi. Identitas dan makna politik menjadi kacau balau dan kabur. Seperti ketika misalnya, SBY mengatakan tentang usaha “penyelamatan perekonomian Negara” di atas. Usaha penyelamatan yang coba diusungnya lain dengan aktifitas politik dan tindakan politik yang terlihat. Misalnya kasak-kusuk tentang Srimulyani yang belakangan menjadi kenyataan. Dan perubahan dengan tiba-tiba pencitraan politik dalam waktu dekat mengenai Century. Ini menunjukkan seolah-olah arah politik yang tidak jelas. Sehingga jargon-jargon penyelamatan ekonomi, kepentingan rakyat, penegakan hukum, dan lain-lain menjadi racauan yang sama dengan racauan orang-orang yang sakit jiwa. Racauan kosong yang hanya berisi *image* murni, tidak substantif. Sehingga sosok SBY, kerap ditemukan dalam berbagai identitas dan citra yang sedikit banyak tidak relevan dengan realitas publik sendiri, cenderung majemuk serta nomaden.

Ketiga celebritasasi yang diangkat sebagai ide politik, berdasarkan konsep Chaney di atas. Peran dan identitas celebritas membentuk suatu motif citra yang kental dan kuat bagi politikus, begitupun SBY. SBY mencitrakan dan mengkonstruksi dirinya sebagaimana para selebritis mengkonstruksi dirinya. Bagaimana identitas dengan potensi populis dijadikan citra dirinya. SBY dalam konteks ini bisa menjadi apa saja, asal memiliki nilai “tontonan” tinggi. Tidak harus, bahkan kalau pun berlawanan dengan kepentingan publik pun, sah-sah saja. Semua hanya dalam konteks popularitas, meskipun harus segera ‘berganti baju’ politik dengan cepat. Di atas terlihat bahwa, pernyataan SBY dalam dua kasus itu menunjukkan banyak identitas berbeda melalui pencitraannya. Dalam kasus terorisme, dua citra utama terlihat. Pertama sebagai sosok yang seolah-olah sebagai penengah dan tidak kontra terhadap kelompok manapun. Seolah berada ditengah dan menyajikan solusi sosial ekonomi sebagai analisisnya. Kedua, secara tiba-tiba pada sesi lain. SBY menuding kelompok tertentu dan menjadi sosok yang kontra terhadap kelompok kaum muslimin, dan bahkan digulirkan wacana tentang pengawasan terhadap program pengajaran pesantren dan dakwah yang menunjukkan citra kontra terhadap kelompok agamis islam dalam tataran kebijakan aparatusnya.

⁴ Jean francois lyotard berpendapat bahwa pa yang penting dalam pandangan konstruksi pengetahuan dan relitas pada masa masa postmodernisme bukanlah sebuah narasi besar(*grand narrative*) , tetapi sebuah relasi yang dibuat dlam sebuah narasi kecil. Dan seolah olah menjadi narasi besar sehingga distinguasi antar elemen dalam relitas masyarakat seolah olah menjadi distinguasi permaenen dan benar benar ada padahal itu hanyalah konstruksi frgmen yang seolah olah menjadi relitas asli yang oleh lyotard dikonsepsikan sebagai meta narrative. (Ritzer 2009;215-217....)

Pada kasus Century, identitas SBY awalnya mengacu pada bentuk citra sebagai pemimpin yang arif dan menjadi solusi penengah yang heroik yang membela aparatnya. Namun, tiba-tiba dalam waktu dekat, berubah menjadi seorang oportunis yang ‘membantai’ aparatnya. Berbagai sosok dan versi citra SBY diatas menunjukkan, bahwa SBY berupaya menghidupkan opini dan citra tertentu atas dirinya. Sebuah citra populis yang menyebabkan dirinya terlihat indah dalam kacamata pencitraan politik, dan bernilai tontonan pada masyarakat tontonan. Yang artinya, pada dasarnya manuver politiknya adalah sebuah dandanan apik untuk supaya indah dilihat. Ketimbang manuver yang justru menyajikan realitas solusi kepentingan publik dan implementasinya. Ini sama seperti bagaimana setiap selebritas memberlakukan dan mengkonstruksi diri mereka dalam ruang citra pekat, yang sebenarnya bukan menjadi domain asli dari realitas diri mereka sendiri. Tetapi sebuah domain yang asing bagi ‘diri’ mereka sendiri. Empat, politik simulasi dan citra kosong. Karena logikanya, politik skizofrenis dan nomadisme politik sebagai tindakan dan citra politik SBY, maka politik yang dijalankan dengan simulasi sebagai proses politiknya dan penciptaan ruang-ruang hiperealitas sebagai ruang politik yang kosong. Maka seluruh bentuk penandaan dalam pesan-pesan politik adalah simulasi bukan representasi, apalagi realitas. Ini jelas terlihat bahwa citra diri di media, berbeda dengan janji politiknya, juga berbeda dengan aplikasi realitas politik di lapangan dan berbeda dengan realitas publiknya sendiri.

Indikasi nomadisme politik pada berbagai pencitraan seorang aktor politik, dinilai sebagai suatu manifestasi gejala skizofrenia politik. Dalam konteks, SBY terlihat ‘kepribadian ganda’ yang terus berubah secara politis dari isu satu, ke isu yang lain, dan menunjukkan loncatan realitas politik yang kadang cenderung teaterikal dan dramatis dengan basis kepentingan tontonan dan popularitas. Kecendrungan ini juga sering terlihat dalam kelambanan tindakan tindakan dan aksi-aksi politik. Seolah-olah mencari sebuah formulasi citra yang tepat, ini wajar bagi seorang aktor politik. Hanya saja jika kemudian citra politik dan pesan politiknya hanyalah simbol-simbol murni dan kosong, maka kontribusi dan implementasi politik pada kepentingan publik, pasti dikorbankan. Sehingga dalam pribadi SBY, seolah-olah ada dua persona, yaitu persona yang bertindak dalam ruang realitas; semua yang berhubungan dengan implementasi politik. Serta, persona yang bertindak diluar ruang realitas; persona hanya mencitrakan dan citra itu bukanlah realitas politiknya; persona yang dirinya dan tindakannya dibentuk oleh konstruksi politik semat dan bersifat populer secara ekstrem.

Ini terlihat dalam beberapa konstruksi dirinya dalam isu besar di atas, antara sosok berbaju militer, sosok berbaju santri serta sosok korban. Antara sosok penegak hukum, dan sosok yang loyalis. Seolah-olah ada banyaknya sosok dalam dirinya. Ini juga terlihat dalam kecepatannya menjawab suatu isu tanpa melihat kepentingan isu. Seperti misalnya, ketika presiden memberikan statement terhadap ucapan pribadi Munarman terkait isu ucapan petinggi sebuah LSM islam itu mengenai pem”bekali”an SBY. SBY secara langsung menjawab pertanyaan dengan sangat emosional. Ini berbeda dengan pakem citranya yang selalu terlihat dicitrakan sabar. Disini terlihat pribadi yang seolah-olah tak terkendali menjawab pertanyaan dengan sangat cepat, tetapi sebenarnya tidak penting. Sehingga identitas lain terbentuk bahwa SBY cenderung pemarah dan tersinggung, lain dengan citranya dikampanye yang digambarkan agamis dan sabar.

Politik Postmodernisme dan Alienasi Identitas

Skizofrenia dan nomadisme menandakan loncatan-loncatan lepasnya sebuah penanda identitas dari diri seseorang dengan realitas ataupun *genuine self hood*-nya. Artinya ada sebuah keterlepasan dan pengasingan seseorang dengan realitas dan idealisme dirinya. Dalam beberapa hal manifestasi Skizofrenik ini bisa dipandang dalam konteks alienasi.

Karen Horney, seorang psikoanalisis kritis berpendapat, bahwa alienasi orang dengan citra dirinya atau dengan dirinya sendiri terjadi akibat orang terlupa dengan dirinya yang real. Kondisi ini terjadi ketika seseorang mengembangkan suatu gambaran ideal tentang dirinya sendiri, secara begitu berbeda dari keadaan dirinya yang real, sehingga terdapat jurang pemisah yang dalam antara dirinya dengan citra dirinya (Schacht 2006, 194). Pendapat ini dapat memberikan penjelasan pada bagaimana perilaku aktor politik dalam konteks postmodernisme dan bahkan menjadi sifat utama dari politik di kondisi tersebut. Dimana alienasi terjadi pada sang aktor pada tingkat dimana ia sulit meninggalkan pencitraan dirinya pada berbagai acuan masyarakat -dalam hal ini pencitraan diri sangat dipengaruhi oleh bagaimana representasi dan konstruksi media terhadap dirinya. Ini menyebabkan sepak terjang kekuatan politik akan mengarah pada popularitas, yang sebenarnya sangat cair dalam konteks banjir informasi dan banjir tanda. Sehingga aktor politik akan menjadi sangat liquid; menjadi encer dan seolah tanpa bentuk yang kaku. Dan cenderung nihil dalam hal eksistensi keaslian dirinya.

SBY sendiri memperlihatkan hal tersebut dengan berusaha memperlihatkan dirinya berpihak seolah-olah populis. Seolah-olah dia adalah rakyat biasa, sama dengan masyarakatnya. Namun manuver politik yang dirasakan masyarakat dalam konteks tataran realitas tidak banyak terkena, atau terpenuhi. Kepentingan politik citra telah membentuk dirinya untuk menjadi lebih disukai dalam konteks budaya pop. Bukannya mengeluarkan karakter politik yang kuat sebagai pemimpin, tetapi justru menghadirkan keragu-raguan. Loncatan politik yang begitu cepat, dan tak menentu, dan terkadang sangat goyah dalam struktur eksekutif dan legislatifnya; sehingga berbagai isu yang diledakkan oleh media seolah-olah megubahnya jadi bungloon bukan justru memberikan suatu karakter yang kuat, tetapi justru sama dengan liputan-liputan gossip. Seperti tidak bisa dibicarakan substansinya, tetapi yang terkena adalah pesona celebritasnya tentang suatu isu, baik itu negatif ataupun positif.

PENUTUP

Kesimpulan

Skizofrenia SBY terlihat dari berbagai nomadisme semiotis, dalam hal ini pendirian dan identitas SBY terlihat mengambang dan oportunistis dalam dua kasus yang diulas di atas. Kepopuleran cenderung mempengaruhi bagaimana ia membuat keputusan politik. Pembicaraan pembicaraan politik SBY seolah olah dilakukan oleh beberapa sosok yang berbeda. Seolah-olah identitas sejatinya tak bisa digambarkan dengan pasti.

Sifat selebritas dalam politik postmo SBY sebenarnya telah menghasilkan sebuah alienasi diri pada diri dan sosok SBY sebagaimana banyak ditemukan juga dalam kehidupan selebriti biasa (nonpolitik) hanya saja ini menyangkut hubungan dengan relitas kepentingan publik yang akhirnya terpengaruh sedikit banyak oleh gaya *life style* kepemimpinan yang cenderung skizofrenik itu. Sehingga dalam banyak hal dimensi kepemimpinan SBY membangun

pemisahan antara ruang realitas diri, pencitraan diri di media dan ruang realitas kepentingan publik sendiri. Sebuah fragmentasi yang bergaya postmodern yang sangat surealistik yang merayakan skizofrenia dengan melakukan nomadisme politik secara terus menerus —dalam waktu yang berdekatan khususnya .

Saran

Paper ini adalah sebuah tinjauan teoritis pada sebuah gejala kepemimpinan dalam masa informasi dan postmodernisme. SBY sebagai sosok yang merupakan leadership dalam konteks ini memiliki karakter lain dari pemimpin-pemimpin dalam masa sebelumnya. Politik citra, nomadisme dan alienasi dalam gaya hidup mewarnai politik selebritas dari seluruh politikus di dunia. Untuk itu untuk menambah kajian tentang ruang postmo dan membentuk politik serta identitas secara empiris perlu diadakan sebuah riset dengan empiri lengkap yang memadukan metode-metode sehingga bisa dilihat retasan-retasan yang signifikan secara semiotik dan secara *socio cultural* mengenai aktor-aktor politik sehingga berkontribusi kuat pada pembangunan politik dan kajian ilmu komunikasi khususnya komunikasi politik.

Daftar Pustaka

- Altschull, Herbert J. 1995. *Agent of Power*. New York : Longman.
- Berger, Peter dan Luckmann, Thomas. 1979. *The Social Construction Of Reality: A Treatise In The Sociology Of Knowledge*. Middlesex, England: Penguin Books.
- Chaney , David. 2004. *Lifestyles: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jogjakarta : Jalasutra.
- Eco, Umberto. 1979. *A Theory Of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.
- Holmes , David. 2005. *Communication Theory : Media , Technology , And Society*. London: SAGE.
- Jameson, Fredric. 1991. *Postmodernism , Or The Cultural Logic Of Late Capitalism*, Durham: Duke University Press.
- Kellner, Douglas .2010. *Budaya Media: Cultural Studies , Identitas, Dan Politik Antara Modern Dan Post Modern*. Jogjakarta: Jalasutra.
- Lash , Scott. 2004. *Sosiologi Postmodernisme*. Yogyakarta : Kanisius.
- McNair , Brian .2003. *Introduction To Political Communication*, London, Routledge
- Pandie , Yop . 2007. *Polemik cabut mandat SBY*, Jakarta : Bina Rena Pariwisata.
- Piliang , Yasraf A. 2005. *Transpolitika*, Yogyakarta : Jalasutra.
- Ritzer , George ,2009. *Teori Sosial Postmodern* , Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Schacht, Richard . tanpa tahun. *Alienasi: Pengantar Paling Komprehensif*, Jogjakarta : Jalasutra.